

**PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN**

**ADAT JAWA PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

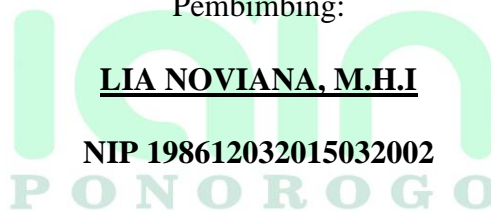
**NURUL AINI**

**NIM 210117080**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I**

**NIP 198612032015032002**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Aini, Nurul**, 2021. *Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

**Kata kunci/keyword** : *'Urf*, perkawinan, penghitungan weton, adat Jawa

Adat Jawa memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di tanah Jawa. Masyarakat masih sangat memercayai adat Jawa dengan menjaga dan melestarikan hingga sekarang. Adat Jawa masih digunakan untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan. Dalam masyarakat, penghitungan weton sebagai salah satu ikhtiar untuk mencari yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Lokasi penelitian berada di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, di desa ini masih kental terhadap adat Jawanya terutama dalam hal perkawinan. Sebelum perkawinan sudah pasti dihitung wetonnya dan dicarikan hari baik oleh perjangga,

Untuk menjelaskan penghitungan weton yang ada di Desa Karang, maka peneliti akan membuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo perspektif *'urf* ?, (2) Bagaimana penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo perspektif *'urf*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan penelitian, praktik penghitungan weton yang ada di Desa Karang dalam perspektif *'urf* adalah termasuk dalam *'urf shahih* karena telah memenuhi syarat sebagai *'urf* yang dapat diterima atau *'urf shahih*. Untuk penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton juga termasuk dalam *'urf shahih* karena telah sesuai dan memenuhi syarat sebagai *'urf* yang dapat diterima. Syarat-syarat *'urf* dapat diterima atau dapat dikatakan shahih adalah tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*, *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Aini  
NIM : 210117080  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf  
(Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan  
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 27 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

Lia Noviana, M.H.I  
NIP. 198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Aini  
NIM : 210117080  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif  
'Urf (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan  
Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 07 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Mei 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji : Dr. Hj.Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I. (  )

Ponorogo, 20 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**

NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aini  
NIM : 210117080  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf  
(Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan  
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nurul Aini  
NIM : 210117080  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf  
(studi kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten  
Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atas dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka sebenarnya saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 April 2021



Nurul Aini  
210117080



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri serta saling membutuhkan satu sama lain dalam segala hal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita ambil adalah sebuah perkawinan, jelas bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi membutuhkan orang lain sebagai calon pasangan dari perkawinan tersebut.

Seluruh manusia yang ada di dunia ini tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup secara berpasang pasangan, termasuk juga manusia. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya:

Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS.Adz-Dzariyat: 49).<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan perkawinan bagi manusia yang tidak boleh dilanggar. Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 51:49.

seperti binatang.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam hadis juga dianjurkan untuk menikah bagi yang mampu karena menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.

Di Indonesia perkawinan dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang mana berbagai adat dan tradisi berbeda-beda di setiap daerahnya. Masyarakat Jawa telah mempercayai kebiasaan dari pendahulu atau sesepuh dan juga terus menerus mengamalkan ilmu yang didapat. Mereka biasa menyebut sebagai ilmu *titen* atau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cermat-mencermati.

Para sesepuh terdahulu selalu mencermati apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan sesuatu dan kemudian ilmu itu diturunkan ke anak cucu atau generasi ke generasi. Masyarakat berpegang pada adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai '*urf*'.

Pada dasarnya hukum adat atau '*urf*' dapat dijadikan sebagai hukum, namun tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum. Untuk menjadi patokan hukum terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat itu sendiri. Dalam *ushul fiqh*, adat atau kebiasaan ('*urf*') dapat dijadikan sebagai hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam. '*Urf*' yang di maksud di sini adalah sesuatu yang dikenal oleh

---

<sup>2</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusta Mahmudah,ka Amani, 2002), 1



masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat Jawa, terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Seperti harus menghitung weton untuk mencari hari yang tepat untuk kedua calon pengantin sampai pada setelah perkawinan seperti *selapanan* atau 35 hari an pasca menikah.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, di sini masih terdapat adat atau kebiasaan penghitungan weton sebelum dilaksanakannya perkawinan. Menurut masyarakat alasan adanya penghitungan weton ini adalah untuk kebaikan bagi mempelai dan keluarga kedepannya setelah menikah tetapi apabila terdapat ketidakcocokan, maka perkawinan pun dapat dibatalkan. Dan juga dalam masyarakat Desa Karang masih sangat mengutamakan atau memprioritaskan adat penghitungan weton tersebut.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dimulai sejak tahun 2018 terdapat tiga puluh tiga pasangan yang melaksanakan perkawinan, pada tahun 2019 sebanyak tiga puluh empat pasangan dan pada tahun 2020 terdapat tiga puluh tiga pasangan. Dari data tersebut sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat sebanyak seratus pasangan.<sup>4</sup>

Praktik penghitungan weton telah dilakukan sejak dahulu yang diteruskan secara turun temurun yang menggunakan ilmu *titen* untuk memprediksi suatu hal. Tujuan dari penghitungan weton adalah untuk

---

<sup>3</sup>Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 81.

<sup>4</sup>Data KUA Kecamatan Badegan.

menentukan hari baik perkawinan, menentukan hari yang tepat untuk membuka usaha setelah perkawinan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dikarenakan masih banyak fenomena ataupun permasalahan dalam masyarakat terkait adat Jawa khususnya tentang penghitungan weton, maka peneliti berinisiatif untuk membuat skripsi ini dengan judul yang masih relevan dengan realita diatas yaitu penghitungan weton perkawinan adat jawa perspektif '*urf*' (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut , peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo perspektif '*urf*'?
2. Bagaimana penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo perspektif '*urf*'?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo perspektif '*urf*'.

---

<sup>5</sup> Samin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Februari 2021.

2. Untuk menjelaskan penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo perspektif *'urf*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat yang terdiri dari dua hal, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat membantu melengkapi referensi tentang Hukum Keluarga Islam yang dapat digunakan sebagai acuan bagi civitas akademik dalam mempelajari penghitungan weton perkawinan yang ada di berbagai daerah khususnya di Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti dapat menambah pengalaman dalam kehidupan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Masyarakat mendapat tambahan pengalaman serta ilmu mengenai Hukum Islam terutama tentang *ushul fiqh* dan *fiqh munakahat*.

c. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan diskusi dan menambah wawasan serta informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dengan tema yang hampir sama.

### E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penghitungan weton perkawinan adat Jawa yang mana literature tersebut masih relevan dengan penelitian ini dengan tujuan membandingkan penelitian terdahulu dengan peneelitan yang akan dilakukan. Antara lain:

Yang pertama skripsi dari Miftah Nur Rohmah, Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Skripsi, 2016.

Penelitian ini berisi tentang praktik pernikahan dengan perhitungan weton. Penelitian ini menghasilkan praktik tersebut merupakan adat tradisi yang diwariskan oleh leluhur yang masih digunakan.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada perspektif yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan perspektif *mashlahah* sedangkan yang akan diteliti menggunakan *'urf*.

---

<sup>6</sup> Miftah Nur Rohmah, "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2016).

Kedua skripsi dari Siti Mahmudah, Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Skripsi, 2017. Isi dari penelitian ini mencakup tentang praktik dan alasan masih menggunakan perhitungan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat masih mempercayai adat perhitungan Jawa.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian ini terkait perihal alasan dari masyarakat sedangkan yang akan diteliti adalah kedudukan penghitungan weton dalam perkawinan.

Ke-tiga skripsi dari Rista Aslin Nuha, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Skripsi, 2019.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana weton hidup dan diterima oleh masyarakat Pati. Hasilnya adalah penulis menyebut bahwa weton ini adalah *'urf* sah dan dilakukan secara turun temurun.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada teknik pengambilan data beberapa teknik salah satunya adalah studi pustaka, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan teknik studi pustaka. Serta perspektif yang digunakan juga berbeda.

Yang ke-empat adalah jurnal dari Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, Tradisi Penghitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa

---

<sup>7</sup> Siti Mahmudah, "Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)," *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>8</sup> Rista Aslin Nuha, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam", skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, jurnal, 2021. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana masyarakat dalam menentukan calon pasangan dalam hitungan weton, pandangan tentang implementasi dan pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap implementasi hitungan weton.<sup>9</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini tidak menyinggung terkait cara menentukan pasangan dalam hitungan weton dan dalam penelitian menggunakan pandangan dari 'urf.

Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faruq, Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan, dalam jurnal ini menggambarkan tentang perhitungan weton sebelum perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk usaha untuk mengurangi keraguan juga digunakan sebagai pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah tinjauan hukum yang digunakan berbeda, dalam jurnal ini menggunakan tinjauan hukum Islam secara lebih luas, sedangkan untuk penelitian ini lebih kecil lingkungannya yaitu tinjauan 'urf.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, Tradisi Penghitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, *Shautuna*, 1, (Januari 2021).

<sup>10</sup> Ahmad Faruq, "Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan," *Irtifaq*, 1 (Maret 2019).



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk meneliti objek secara lebih menyeluruh.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke Desa Karangon Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo guna memperoleh data yang dibutuhkan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif lapangan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori hukum Islam seperti *fiqh*, *ushul fiqh* dan lain sebagainya.

### 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai observer atau pengamat secara langsung. Peneliti akan terjun langsung ke Desa Karangon Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo untuk mengamati secara langsung praktik penghitungan weton yang dilakukan oleh perjangga serta menyelesaikan ketidakcocokan hasil dari penghitungan weton.

---

<sup>11</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT Grafindo , 2012), 2

### 3. Lokasi Penelitian

Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini, dengan alasan bahwa di Desa tersebut masih berlaku hukum adat yang masih kental.

Jadi setiap akan mempunyai hajat biasanya tanya ke orang yang lebih tua harinya apa wukunya apa seperti itu, itu memang benar disini masih sangat kental akan adanya itu. Hampir semua yang akan melaksanakan perkawinan pasti dihitung dua wetonnya<sup>12</sup>

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah informasi yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di lapangan. Data yang dibutuhkan adalah yang pertama praktik penghitungan weton sebelum perkawinan dan yang kedua adalah penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton sebelum perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama.<sup>13</sup> Data ini berupa teks hasil wawancara dan

---

<sup>12</sup> Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 maret 2021.

<sup>13</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 204.

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah hasil wawancara dari perjangga dan beberapa anggota masyarakat sekitar yang menggunakan penghitungan weton.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>15</sup> Biasanya berupa dokumen seperti karya ilmiah dan seterusnya. Data ini diperoleh dari arsip kantor kepala desa terkait profil desa Serta hasil wawancara dari kepala desa dan juga tokoh agama serta beberapa anggota masyarakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>16</sup> Pihak yang akan menjadi narasumber adalah kepala desa, perjangga, tokoh agama dan beberapa warga masyarakat setempat yang berkaitan langsung dengan penghitungan weton sebelum perkawinan.

---

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

<sup>15</sup> Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 205.

<sup>16</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176.

b. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>17</sup> Observasi ini dilakukan langsung di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan mengamati maka peneliti dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan weton yang ada dalam masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto dari para narasumber, dokumen dari pihak desa terkait jumlah penduduk, pendidikan di Desa Karang dan lain sebagainya.

## 6. Analisis Data

Tripp (1996) mengurai mengenai analisis data secara lebih jelas: analisis data merupakan proses mengurai (memecah) sesuatu kedalam bagian-bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data

---

<sup>17</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 93.

<sup>18</sup> Ibid, 158.

yaitu identifikasi apa yang ada dalam data, melihat pola-pola dan membuat interpretasi.<sup>19</sup>

Peneliti mengidentifikasi data dari lapangan, melihat pola-pola dari data yang satu dengan data yang lainnya kemudian akan ditafsirkan sehingga membentuk suatu analisa yang lebih jelas dan rinci.

Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, lalu dikembangkan menjadi hipotesis kemudian dirumuskan berdasarkan data dan dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data tersebut.<sup>20</sup>

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta

---

<sup>19</sup> Ibid, 192.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan memberikan gambaran mengenai pokok bahasan dalam penelitian yang digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi landasan teori berupa *'urf* dan perkawinan. Teori *'urf* berisi pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat *'urf* dan kehujjahan *'urf*. Sedangkan teori perkawinan berisi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan.

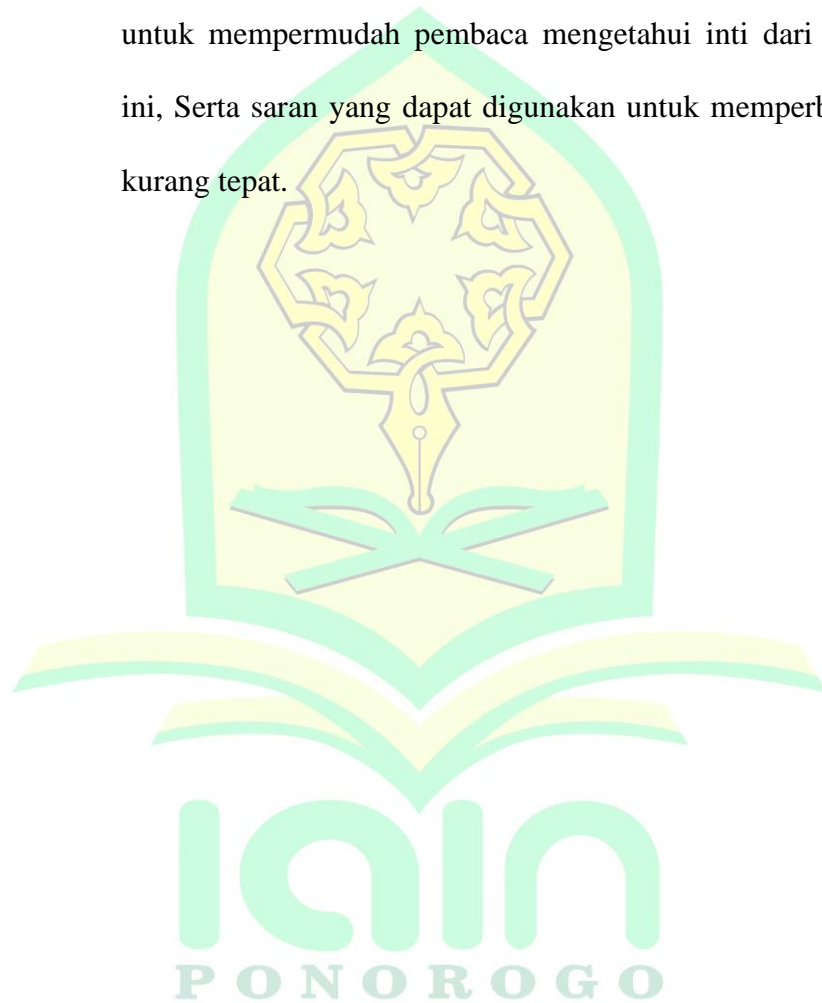
BAB III Pada bab ini pertama peneliti akan memberikan sedikit gambaran terkait Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, letak geografis, data perkawinan dan sebagainya. Kemudian peneliti akan membahas tata cara menghitung weton serta penyelesaian apabila terdapat ketidakcocokan dari hasil penghitungan weton bagi masyarakat setempat.

BAB IV Berisi analisis peneliti dari hasil data yang diperoleh kemudian disandingkan dengan teori yang telah ada. Analisis pertama



mengenai tinjauan '*urf*' mengenai praktik penentuan weton perkawinan yang kedua tinjauan '*urf*' terhadap penyelesaian ketidakcocokan hasil penentuan weton perkawinan.

BAB V Berupa penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah secara ringkas dan jelas untuk mempermudah pembaca mengetahui inti dari penelitian ini, Serta saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki yang kurang tepat.



## BAB II

### 'URF DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

#### A. Adat Dalam Islam ('Urf)

##### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف - يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ru'f" (المعروف) yang artinya sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" disini lebih dekat dengan pengertian "diakui oleh orang lain". Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf atau dengan kata lain sinonim, seandainya dua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat.<sup>21</sup>

'Urf dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan "al-'Adah". Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa 'urf dan adat adalah suatu istilah yang memiliki arti sama.<sup>22</sup>

Tentang pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad ataupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009), 387.

<sup>22</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008),

berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.<sup>23</sup>

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan adalah Al-Qur'an dan Hadis.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum *'Urf*

### a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾  
 اعراف: ١٩٩

Artinya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf: 199)<sup>25</sup>

### b. Kaidah

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا، وَالْعُرْفُ

شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

<sup>23</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

<sup>24</sup> Ibid, 163.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 7:199.

Artinya:

'Urf pada *syara*' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan kaidah 'urf itu merupakan dasar hukum yang dikokohkan.

### 3. Syarat 'urf dapat dijadikan patokan hukum

'Urf dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih daripada itu.<sup>26</sup> 'Urf dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah 'urf yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum.<sup>27</sup>

Apabila terjadi pertentangan antara 'urf dengan *nash*, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam perkawinan, seorang isteri mempunyai suami lebih dari satu.<sup>28</sup> Syarat 'urf dapat dijadikan patokan hukum antara lain:

1. Harus 'urf yang shahih.<sup>29</sup>
2. Tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 129.

<sup>27</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi... Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 77.

<sup>28</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 103.

<sup>29</sup> Abdurrahman Misno, Nurhadi, *Ilmu Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 125.

<sup>30</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, 129.

#### 4. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, penggolongan macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa segi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Ditinjau dari segi sifatnya

##### 1) 'Urf Qauli

'Urf qauli adalah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan sebagai anak laki-laki saja.

*Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air (ikan).<sup>31</sup> Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 14.

##### 2) 'Urf Fi'li

---

<sup>31</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 82

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan<sup>32</sup> seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.<sup>33</sup>

Umpamanya kebiasaan jual beli barang enteng, transaksi antara penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.<sup>34</sup> kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri dan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>35</sup>

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) *'Urf* umum (*'aam*)

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil,<sup>36</sup> mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah

---

<sup>32</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 149-150.

<sup>33</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, 83.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

<sup>36</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1*, 151.



membantu kita.<sup>37</sup> Pemakaian kata thalaq untuk lepasnya ikatan perkawinan.<sup>38</sup>

## 2) *'Urf* khusus (*khash*)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.

Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah sedangkan untuk orang Jawa menggunakan kata “paman” untuk adik dan kakak dari ayah.<sup>39</sup>

### c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*

#### 1) *'Urf shahih*

Yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya yang luhur<sup>40</sup>, saling diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, 83.

<sup>38</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 150.

<sup>39</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqih 1*, 151.

<sup>40</sup> Ibid. 151.

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 104.

Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap sebagai mas kawin. memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>42</sup>

## 2) 'Urf Fasid

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat, meskipun merata pelaksanaan-nya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah).<sup>43</sup> Juga tentang memakan barang riba'<sup>44</sup>

## 5. Kehujjahan 'Urf.

Berbicara tentang kehujjahan 'urf, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *ushul fiqh*. Yang menghasilkan dua golongan, perbedaan tersebut antara lain:

### a. Pendapat dari golongan Hanafiyyah dan Malikiyah.

Pendapat ini mengungkapkan bahwa 'urf adalah *hujjah* untuk menetapkan hukum. Alasan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

اعراف: ١٩٩

<sup>42</sup> Nawani, *Ushul Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 96.

<sup>43</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih I*, 151.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), 129.

Artinya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf: 199).<sup>45</sup>

Maksud dari ayat diatas, bahwa '*urf* adalah kebiasaan manusia dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini, memiliki makna Allah SWT. memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Karena ini merupakan suatu perintah, maka '*urf* dianggap oleh *syara*' sebagai dalil hukum.<sup>46</sup>

b. Pendapat dari golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah.

Keduanya tidak menganggap '*urf* itu sebagai *hujjah* atau dalil hukum *syar'i*. Para ulama juga sepakat, menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak ayat yang menguatkan kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

Dari kasus '*urf* yang ditemukan, para ulama *ushul fiqh* merumuskan kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang berkenaan dengan '*urf*. Kaidah-kaidah yang dimaksud Antara lain:

أَلْعَادَةُ

مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

أَلْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ

شَرْطًا

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 7:199.

<sup>46</sup> Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 166.

<sup>47</sup> Ibid, 167.

Artinya:

Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ

بِالْتَّصِرِّ

Artinya:

Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash*.

## B. Perkawinan dalam Islam

### 1. Pengertian perkawinan

Dalam Al-Qur'an dan hadis, perkawinan disebut *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zi>jah* (الزوجة - الزوج). Yang dimaksud *az-ziwaj* - *az-zawj* disini adalah *at-tazwij* yang diambil dari kata *zawwaja -yuzawwiju - tazwi>jan* (تزوج - يزوج) dalam bentuk timbangan *fa'ala -yufa'ilu - taf'ilan* (فعل - يفعل - تفعل) yang secara harfiah artinya mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>48</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnah, perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi

<sup>48</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 42-43.

manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah siap mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an, antara lain surat adz-Dzariat ayat 49 dan surat An-Nisa ayat 21. Sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿الدَّارِيَاتِ

: ٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir. (QS. Adz-Dzariat: 49).<sup>50</sup>

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad perkawinan seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghali>dhan sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:<sup>51</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ

بَعْضٍ

Artinya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kam telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-

<sup>49</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 20-21.

<sup>50</sup> Al-Qur'an, 51:49.

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 13.

istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>52</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah atau tidaknya ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya ibadah, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu.<sup>53</sup>

Rukun dalam perkawinan di antaranya adalah mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dua orang saksi dan shighat/akad. Syarat perkawinan antara lain:

#### a. Syarat dua mempelai

##### 1) Syarat mempelai pria

Beragama Islam, laki-laki tulen, calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, calon suami *ridla*, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat.

##### 2) Syarat calon pengantin perempuan

Beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa*, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan

<sup>52</sup> Al-Qur'an, 4:21.

<sup>53</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,



perkawinan dan tidak dalam masa *'iddah*, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.

b. Syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, *baligh*, berakal dan adil artinya tidak fasik. Wali yang utama adalah bapak dan kakek<sup>54</sup>

c. Syarat saksi

Terdapat perbedaan pendapat di antara Imam madzhab terkait syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi dalam perkawinan. Perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Imam Hanafi, syarat menjadi saksi adalah berakal, *baligh*, merdeka dan Islam. Mendengar ucapan ijab dan qabul dari kedua belah pihak.
- 2) Imam Hambali, mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah dua orang laki-laki yang *baligh*, Islam, dapat berbicara dan mendengar, bukan berasal dari satu keturunan kedua mempelai.
- 3) Imam Syafi'i, syarat-syarat saksi adalah dua orang saksi, berakal, *baligh*, Islam. Mendengar, dan adil.<sup>55</sup>

d. Syarat shighat/akad

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri, syarat-syaratnya adalah kedua belah pihak sudah

<sup>54</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar baru algensindo, 2018), 384.

<sup>55</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikh munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),

tamyiz, ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis, ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab, pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.<sup>56</sup> Lafal akad harus ada kata nikah, *tazwij* atau maknanya, tidak boleh dari kata kiasan seperti kata halal, milik atau hibah.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Ibid, 79.

<sup>57</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 74.

### **BAB III**

## **PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN DI DESA KARANGAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

### **A. Gambaran umum Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.**

#### **1. Sejarah Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Pada masa pemerintahan kasultanan Surakarta Hadiningrat di masa penjajahan Belanda, terjadi kekisruhan imbas dari politik adu domba dan pemecahan kekuasaan, maka terpecahlah menjadi dua wilayah yaitu wilayah Surakarta dan Mangkunegaran yang mana di wilayah Wonogiri ke timur masuk dalam kekuasaan Mangkungan. Pada jaman itu terjadi pula otonom di bawahnya, dikarenakan perkembangan penduduk dan untuk pembenahan wilayah, maka pada waktu itu palang yang berada di Tanjunggunung (sekarang Desa Tanjunggunung), untuk dijadikan dua bekelan.

Palang menjadi bingung untuk menetapkan batas-batas yang akan digunakan untuk wilayah ini, namun karena tugas dari atasan akhirnya dari hasil musyawarah dan lelatu yang dilaksanakan, beliau mendapat petunjuk dari sesuatu yang dianggapnya baik, petunjuk tersebut yaitu ada sebuah saluran kecil yang bermuara dari sebuah gunung yang di sana banyak tumbuh-tumbuhan pohon tanjung.

Bermulalah beliau menelusuri saluran tersebut dan akhirnya sampailah pada sebuah dataran yang sangat sejuk. Karena kelelahan beliau istirahat sampai tertidur. Tak terasa, matahari sudah tinggal sepenggalah, palang tersebut terjaga dari tidur, dengan gundah hati beliau menyesali yang telah terjadi.

Dalam benak hati, beliau bergumam kenapa sampai tertidur, setelah diamati ada perbedaan dalam perjalanan yang telah dilaksanakan. Di dataran ini beliau merasa ada sesuatu yang istimewa, suasananya sejuk damai dan segala kepenatan hilang.

Beliau menatap sekelilingnya ternyata tempat itu banyak pepohonan yang berbeda dari tempat yang dilaluinya, sehingga tempat tersebut seakan bernuansa damai, akhirnya beliau menetapkan perbatasan wilayah yang diamanatkan kepadanya. Karena sudah menetapkan tempat perbatasan tersebut maka terlahirkan Desa Karangan, Karangan yang berarti tempat.

Secara geografis Desa Karangan berbatasan dengan wilayah desa lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Watubonang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dayakan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjungnung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Watubonang<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Data Desa Karangan

## 2. Data perkawinan

Tercatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 angka perkawinan yang ada di Desa Karang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 angka perkawinan<sup>59</sup>

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	33 pasang
2.	2019	34 pasang
3	2020	33 pasang
Total		100 pasang

## 3. Agama/ Aliran Kepercayaan

Masyarakat yang ada di Desa Karang hampir seluruh penduduknya beragama Islam, hanya segelintir orang yang non-muslim, hal ini dapat dibuktikan dari data dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Agama<sup>60</sup>

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	2738 orang	2781 orang
2.	Kristen	0 orang	1 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh masyarakat menganut agama Islam. Masyarakat di sini berpegang teguh pada

<sup>59</sup> Data KUA Badegan.

<sup>60</sup> Data Desa Karang.

Islam dengan aliran *Nahdlatul Ulama* (NU). Hanya beberapa saja yang menganut aliran muhammadiyah yang tinggal di Desa Karang. Dengan demikian penganut aliran *Nahdlatul Ulama* lebih dominan daripada penganut aliran *Muhammadiyah*.

## **B. Praktik Penghitungan Weton Sebelum Perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil data yang diperoleh selama di lapangan. Selama peneliti melakukan penelitian di Desa Karang, peneliti akan menjabarkan hasil yang didapat dengan lebih sederhana dan sistematis.

Penghitungan weton sebelum perkawinan masih berlaku dan tetap eksis di dalam masyarakat Desa Karang. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dari kepala desa, beliau menuturkan: “Itu memang benar disini masih kental, kental banget malah, semua yang mau menikah pasti menghitung weton terlebih dahulu untuk memilih hari baik perkawinan ke orang yang lebih tua.”<sup>61</sup>

Tujuan utama dari penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mencari hari baik untuk ijab. Dalam agama Islam semua hari itu baik, hanya saja kalau di Jawa ada hari-hari sakral yang menurut orang Jawa tidak boleh dilewati atau harus dilewati. Kalau istilah Jawanya *gisir*

---

<sup>61</sup> Pujiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.



*nyowo*, *gisir dunyo* dan *gisir pati*. Itu tidak boleh menikah kalau di desa ini. Masyarakat biasa menyebut dengan istilah *nas*.<sup>62</sup>

Jawa memiliki *nas* nya sendiri, begitu juga wilayah-wilayah yang ada di dalamnya, seperti Ponorogo juga memiliki hari *nas*, Desa Karangpun ada hari *nas*-nya, bahkan setiap keluarga pasti memiliki hari *nas*. Bapak Pujianto juga menuturkan: “Suatu misal, saya mau menikah. Nhapas ijab qabulnya itu hari meninggalnya orang tua. Itu tidak bisa, tidak boleh. Masih sangat kental di sini, semua. Kalau mau resepsi, hajatan apapun itu pasti memilih hari.”<sup>63</sup>

Sebagai orang Jawa, memang sepatutnya melestarikan adat yang sudah ada. Dengan melestraikan adat, maka adat tersebut akan selalu ada dan turun temurun sampai sekarang. Biasanya masyarakat yang akan menikah melakukan penghitungan weton karena alasan orang tua masih sangat meyakini hal tersebut.

Sebagai anak, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi orang tua. Bagi sebagian anak muda yang akan menikah biasanya hanya mengikuti adat saja dan tidak mau membantah. Salah satu warga menerangkan: “*Ya manut adat Jawa, kebanyakan wong jowo kan kudu ngono nek arep rabi, golek dino sik.*”<sup>64</sup>

Sebagai orang Jawa asli sudah sepatutnya untuk menghargai adat dari para leluhur, sekalipun itu kurang sesuai dengan keyakinan hati individu. Bapak Sanawi menerangkan: “kita sebagai orang Jawa yang

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2021.

hidup di tanah Jawa harus bisa saling menghargai sesama. Dalam Islam kan juga diajari untuk saling menghormati.”<sup>65</sup>

Bapak Sanawi juga menambahkan bahwa menghitung weton bertujuan untuk ikhtiar bagi orang Jawa agar terhindar dari sesuatu yang buruk dan berusaha untuk mencari yang terbaik. Masyarakat biasanya juga mencermati perkawinan orang-orang yang menggunakan hitungan weton dan perkawinannya tetap tentram.

Salah satu alasan diharuskan untuk menghitung weton, adalah kita sebagai orang Jawa tidak boleh melupakan leluhur. Mbah Samin juga menuturkan: *“Masalahe wong Jowo kudu ngerti Jawane ngono lo, Jawane ten nopo? Kabeh cara ilmu sumbere ki yo songko ilmu jowo. Tinggalane poro wali, nabi. La nek mbiyen kan tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga, ilmu jowo ki tinggalane Sunan Kalijaga, itungane sunan bonang. Nha nganti sakyahene ilmu jowo tetep dileluri, masalahe opo? Isik akeh wong nggunakne ilmu jowo, contone nek arep manten.”*<sup>66</sup>

Mbah Samin selain menjadi perjangga, beliau juga berperan dalam masyarakat sebagai salah satu tokoh agama yang ada di Desa Karang. Masyarakat mendatangi perjangga biasanya bertujuan untuk mencari hari yang tepat guna melaksanakan perkawinan. Serta sebagai ikhtiar untuk kehati-hatian semata, tidak meyakini sepenuhnya hasil dari penghitungan

---

<sup>65</sup> Sanawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2021.

<sup>66</sup> Samin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 April 2021.

weton tersebut. Bapak Setu menuturkan: “*yo gawe usaha ngindari hal-hal sing ala, tapi yo tetep nyuwun marang gusti Allah.*”<sup>67</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih sangat memerlukan adat Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan untuk menentukan hari baik. Menurut salah satu warga desa yang menggunakan penghitungan weton sebelum perkawinan juga menuturkan: “*Nek arep merencanakan hari nikah iku perlu banget sing namane weton, karena kita sebagai orang Jawa percaya tidak percaya menentukan hari pernikahan ki dicocokkan dulu weton ambi perjonggo di pihak keluarga perempuan, jadi nanti bisa ketemu hari baiknya. Tapi di sisi lain ditanya dulu bagaimana dengan hari tersebut di pihak keluarga laki-laki. Nek seumpama kurang memuaskan, iku bisa di usulkan kembali sampek bener-bener deal di hari itu.*”<sup>68</sup>

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mengetahui weton kelahiran calon pengantin. Yang kedua juga harus mengetahui weton kelahiran calon pasangannya (calon suami atau isteri). Mbah Samin menjelaskan: “*Kalau mau menentukan hari perkawinan melalui hitungan Jawa itu harus membawa hari kelahiran calon pasangan pengantin yang akan menikah, kakung lan putri.*”<sup>69</sup>

Yang selanjutnya adalah membawa hari *nas* dari kedua belah pihak yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Karena tidak

---

<sup>67</sup> Setu, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Mei 2021.

<sup>68</sup> Defi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021.

<sup>69</sup> Samin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 April 2021.

menggunakan hari *nas* dalam perkawinan, maka akan dicarikan hari lain yang tidak menerabas hari yang tidak diperbolehkan tersebut.

Setelah mengetahui ketiga hal tersebut maka orang tua atau wali akan langsung bertemu dengan perjangga untuk dilakukan penghitungan weton guna menentukan hari yang tepat untuk ijab. langkah terakhir dalam penghitungan weton adalah perjangga akan menghitung weton dengan mencari hari yang baik. Mbah samin menjelaskan: "*Ijab e digolekne dino sing ora nerak sirikan, sasi apik, wuku kudu becik dino yo sing apik*"<sup>70</sup>

Perjangga Desa Karanggen menjelaskan bahwa untuk penghitungan weton sebelum perkawinan biasanya setiap perjangga memiliki cara sendiri-sendiri yang tentunya berbeda-beda. Namun hal ini tetap dilakukan dengan tujuan yang sama sebagai salah satu ikhtiar dalam kebaikan.

Mbah Samin menggunakan penghitungan yang paling sederhana dengan menggunakan pembagian tiga. Karena ada juga yang menggunakan pembagian angka lain seperti empat, tujuh, sembilan dan sebagainya. Makna dari pembagian tiga adalah dimaksudkan untuk hari lahir mempelai laki-laki, hari lahir mempelai perempuan dan hari untuk ijab qabul.

Setelah weton laki-laki dan weton perempuan dijumlah, maka hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambah dengan *neptu* yang ketika dibagi tiga tersebut harus ada sisa dua. Setiap hari dan pasaran memiliki *neptu* atau angka yang digunakan untuk menghitung.

---

<sup>70</sup> Ibid.

Tabel 3.3 *neptu* hari dan pasaran<sup>71</sup>

No.	Hari	<i>Neptu</i>	Pasaran	<i>Neptu</i>
1.	Akad (Minggu)	5	<i>kliwon</i>	8
2.	Senin	4	<i>Legi</i>	5
3.	Selasa	3	<i>Pahing</i>	9
4.	Rabu	7	<i>Pon</i>	7
5.	Kamis	8	<i>Wage</i>	4
6.	Jumat	6	-	-
7.	Sabtu	9	-	-

Perjanga juga memberikan contoh penghitungan weton ketika akan melaksanakan perkawinan, yaitu: calon mempelai laki-laki memiliki weton kelahiran selasa *kliwon* dengan jumlah *neptu* sebelas dengan rincian selasa memiliki *neptu* tiga dan *kliwon* memiliki *neptu* delapan.

Calon mempelai perempuan lahir pada kamis *pahing* dengan jumlah *neptu* tujuh belas yang artinya kamis memiliki *neptu* delapan dan *pahing* memiliki *neptu* sembilan, serta hari *nas pon* dan *legi*.

Setelah mengetahui ketiga hal tersebut, selanjutnya adalah menjumlahkan *neptu* dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan hasilnya adalah dua puluh delapan. Kemudian untuk mencari hari yang baik, jumlah *neptu* tersebut dicarikan hari dengan jumlah *neptu* yang ketika dibagi tiga akan tetap menyisakan dua. Untuk contoh di atas, *neptu* yang cocok adalah *neptu* tujuh, sepuluh dan tiga belas.

---

<sup>71</sup> Ibid.

Penjumlahan yang pertama adalah *neptu* tujuh, dua puluh delapan ditambah tujuh adalah tiga puluh lima, kemudian dibagi tiga. Tiga puluh tiga dianggap habis karena sudah dibagi tiga, dan menyisakan dua.

Selanjutnya penjumlahan sepuluh, dua puluh delapan ditambah sepuluh adalah tiga puluh delapan. Tiga puluh dianggap habis, sisa delapan lalu dicari yang bisa dibagi tiga, yaitu enam.

Kemudian delapan dikurang enam adalah dua. Yang terakhir adalah penjumlahan tiga belas, dua puluh delapan ditambah tiga belas adalah empat puluh satu, tiga puluh dianggap habis, sisa sebelas lalu dicari yang dapat dibagi tiga, yaitu sembilan. Kemudian sebelas dikurangi sembilan adalah dua.

Karena *neptu* yang ketika dijumlah dengan weton pengantin dan dibagi tiga tetap sisa dua hanya ada pada *neptu-neptu* di atas seperti tujuh, sepuluh dan tiga belas, maka untuk hari dengan jumlah *neptu* di atas hanya ada pada hari:

1. Senin *pahing* dengan *neptu* tiga belas.
2. Selasa *wage* dengan *neptu* tujuh.
3. Jumat *wage* dengan *neptu* sepuluh.
4. Sabtu *wage* dengan *neptu* tiga belas.
5. Minggu *kliwon* dengan *neptu* tiga belas.

Dengan demikian hari yang tepat untuk melaksanakan hari ijab qabul perkawinan di antaranya adalah hari-hari yang disebutkan di atas.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid.



### C. Penyelesaian Ketidakcocokan Penghitungan Weton Sebelum Perkawinan di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat Jawa yang hidup di tanah Jawa masih memegang erat kepercayaan yang mereka miliki dari dulu. Adat ini selalu dijunjung tinggi keberadaannya dan selalu dilestarikan hingga saat ini agar adat tersebut tidak hilang dan tetap terjaga hingga ke masa depan.

Dalam hal perkawinan di tanah Jawa, tidak luput dari adat yang selalu mereka pegang erat. Apabila terdapat ketidakcocokan, mereka pun tidak akan berani melanggar ketentuan tersebut. Mereka mempercayai bahwa jika tetap melanggar atau tetap melanjutkan perkawinan, tanpa mencari solusi lain yang mungkin dapat dilakukan akan berdampak bagi rumah tangga mereka kedepannya.

Setiap perbuatan itu pasti memiliki akibat yang ditimbulkan baik itu berakibat baik maupun berakibat buruk. Begitu pula dengan adat Jawa, salah satu warga mengungkapkan: “*Koyoke lak adat-adat ngono kui mesti enek, walaupun ora ning jowo. Percoyo gak percoyo sih lak perkoro kui, emang enek akibate biasane.*”<sup>73</sup>

Masyarakat percaya perihal dampak yang diakibatkan dalam adat Jawa ini, terutama dalam penghitungan weton sebelum melaksanakan perkawinan. Tetapi masih terdapat segelintir orang yang tidak terlalu percaya terhadap dampak yang timbul tersebut. Yuli mengungkapkan:

---

<sup>73</sup> Diana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 April 2021.

*“Nek menurutku gak begitu percoyo karo ngono-ngono iku dek, aku percoyo karo sing kuoso lan jodoh nek wis jodoh masi akeh halangane mesti tetep dadi siji.”<sup>74</sup>*

Dalam penghitugan weton, tidak semua hasil yang diperoleh selalu pas atau cocok. Ada kalanya hasil dari penghitungan tersebut akan menunjukkan suatu hal yang tidak diperbolehkan untuk tetap melaksanakan perkawinan. Namun ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk tetap melaksanakan perkawinan. Solusi tersebut biasanya diperoleh dari perjangga, di antaranya adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah hanya salah satu pihak yang diperbolehkan untuk merayakan, bapak Pujiyanto menyatakan: “Itu tergantung yang melakukan, tergantung yang punya hajat. Suatu misal, harus menyocokkan antara calon besan dan calon kedua mempelai diusahakan tidak diperbolehkan untuk melewati hari-hari yang *nas* itu. Dicocokkan lebih dahulu biasanya.”<sup>75</sup> Pendapat tersebut didukung oleh salah satu warga, beliau mengungkapkan: “*Ya jelase rundingane dua belah pihak sih lak kui, piye solusine, amrihe iso ki piye.*”<sup>76</sup>

Biasanya untuk menentukan akan dirayakan di pihak yang mana, akan dilakukan musyawarah agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah yang lain.

Solusi yang kedua adalah memajukan atau memundurkan pelaksanaan perkawinan. Bapak Pujiyanto menuturkan: “Kalau kurang tepat

<sup>74</sup> Yuli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 April 2021.

<sup>75</sup> Pujiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

<sup>76</sup> Diana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2021.

biasanya itu di undur, atau kalau tidak ya diajukan sesuai kesepakatan antar keluarga yang mempunyai hajat. Yang paling penting itu tidak melanggar hari *nas* dalam keluarga masing-masing.”<sup>77</sup>

Begitu juga pendapat dari salah satu warga desa yang juga menyetujui solusi tersebut di mana pelaksanaan akan maju ataupun mundur. Beliau menerangkan: “Jadi *nek kurang pas* di keluarga satu ya harus diselesaikan di hari itu juga, setiap keluarga *enek perjonggone dadi musyawah kabeh*.”<sup>78</sup>

Satu lagi pendapat yang menyetujui solusi tersebut adalah pendapat dari salah satu warga desa juga, yang mengatakan: “*Nek aku manut wae, sing penting acarane lancar*, tidak ada halangan.”<sup>79</sup> Tidak ada permasalahan dengan solusi ini, hampir semua masyarakat menyetujui. Solusi yang diberikan oleh perjangga kepada keluarga calon mempelai akan dilakukan dengan sebaik mungkin, daripada akhirnya tidak jadi untuk menikah lebih baik melakukan solusi tersebut.

Masyarakat rata-rata tidak setuju dengan orang-orang yang tidak mematuhi solusi yang diberikan oleh perjangga. Salah satu warga menuturkan: “*Yo terlalu egois nek menurutku, la kan kui wis digoleki dinone moso yo isek kurang cocok?*.”<sup>80</sup>

Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat dari kepala desa yang juga tidak sependapat dengan orang yang tidak mematuhi atau melanggar solusi

<sup>77</sup> Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

<sup>78</sup> Defi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2021.

<sup>79</sup> Ita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Maret 2021.

<sup>80</sup> Ibid.

yang diberikan perjanga. Beliau menjelaskan: “Itu *biasane* anak, calon mepelai *manut* sama orang tua. *Koe kui arep dirabekne digolekne dino kok ngeyel to nduk, biasane* gitu mbak. *Koe ki ngeyel iki karo wong tuo ngeyel, arep rabi dirabekne ae kok arep ngeyel*, mesti ngono mbak. *Kudu manut* orang tua, *sing nglahirne awake dewe kok*, yang mengukir jiwa *ragane* kita kok.”<sup>81</sup>

Bapak Sanawi juga menjelaskan bahwasannya adat ini sudah memasyarakat sejak dulu meskipun kita tidak terlalu meyakini, tapi jika orang tua sangat percaya kita juga harus mematuhi orang tua. Beliau menuturkan: “Meskipun kita tidak benar-benar percaya, tapi orang tua kita sangat yakin dengan adat Jawa ini, maka kita sebagai anak harus patuh dengan orang tua. Kalau memang orang tua tidak mengizinkan dengan alasan wetonnya tidak pas, sebaiknya kita menuruti kehendak orang tua karena restu orang tua adalah restu Allah juga. Ya kalau memang tidak bisa menikah anggap saja bukan jodohnya.”<sup>82</sup>

Ilmu Jawa bagi orang yang mempercayai, dianggap sebagai panutan yang dapat digunakan sebagai bentuk mencari yang lebih baik dan menghindari segala sesuatu hal yang tidak diharapkan. Karena para leluhur itu selalu mengamati sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan berdasarkan ilmu *titen* tersebut. Masyarakat juga mengamati apa yang terjadi jika ada yang tetap melakukan sesuatu yang dilarang oleh para leluhur tersebut.

---

<sup>81</sup> Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2021.

<sup>82</sup> Sanawi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN**

**DI DESA KARANGAN KECAMATAN BADEGAN**

**KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF ‘URF**

**A. Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Penghitungan Weton di Desa Karangn Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.**

Dari penjelasan para informan di Desa Karangn, dapat disimpulkan bahwa praktik penghitungan weton sudah sangat mendarah daging bagi masyarakat, adat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan hampir seluruh masyarakat Desa Karangn menggunakan penghitungan weton sebelum perkawinan ini guna mencari hari baik perkawinan.

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa praktik penghitungan weton di Desa Karangn yang biasanya digunakan untuk menentukan hari baik ijab qabul. Sebagai dasar pertimbangan teori adalah ‘urf dan perkawinan. ‘Urf dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>83</sup>

Tentang pemakaiannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad ataupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat

---

<sup>83</sup> Muhammad Ma’shum Zein, *Ushul Fiqh*, 127.

berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.<sup>84</sup>

Klasifikasi dari tujuan menghitung weton yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu meyakini kesialan apabila tidak dihitung dan hanya sebagai kehati-hatian atau konsultasi. Jika meyakini kesialan maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan syirik, namun jika hanya sebagai konsultasi maka tidak dianggap syirik.

Praktik penghitungan weton yang ada di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, masyarakat melakukan penghitungan weton hanya untuk kehati-hatian saja atau untuk konsultasi, maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik.

*Urf* dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih daripada itu.<sup>85</sup> *'Urf* dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah *'urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum.<sup>86</sup>

Syarat *'urf* dapat dijadikan hukum adalah:

---

<sup>84</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu & Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

<sup>85</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, 129.

<sup>86</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi... Indonesia*, 77.



1. Harus '*urf*' yang shahih.<sup>87</sup>
2. Tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.
5. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.<sup>88</sup>

Berbicara tentang adat, di Desa Karang masih sangat mempercayai adat Jawa yang diturunkan dari para leluhur. Semua orang di Desa Karang mengetahui adat Jawa ini dan juga dikerjakan oleh mereka.

Berdasarkan syarat '*urf*' dapat diterima sebagai patokan hukum di atas, maka peneliti akan menguraikan satu persatu syarat tersebut.

Yang pertama adalah harus '*urf*' yang shahih, yaitu '*urf*' yang sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>89</sup> Praktik penghitungan weton tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Karena praktik penghitungan weton tidak menyangkut terkait ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT.

Yang kedua tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*, karena praktik penghitungan weton ini hanya bertujuan untuk kehati-hatian semata dan tidak sepenuhnya meyakini. Penghitungan weton dapat dikatakan sebagai salah satu ikhtiar untuk mencari yang lebih

---

<sup>87</sup> Abdurrahman Misno, Nurhadi, ilmu fiqh dari Arabia hingga Nusantara, 125.

<sup>88</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, 129.

<sup>89</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 104.

baik. Jadi tidak akan menimbulkan *kemafsadahan* dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya adalah telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu dari sesepuh dan para pendahulu serta masih eksis hingga saat ini. Penghitungan weton ini sudah diketahui secara luas bagi masyarakat Desa Karang, penghitungan ini sudah umum atau biasa dilakukan ketika akan melaksanakan perkawinan.

Masyarakat Desa Karang hampir seluruhnya memegang kepercayaan agama Islam dengan aliran *Nahdlatul Ulama*, berdasarkan aliran tersebut dapat dilihat bahwa aliran masih membawa pengaruh bagi keyakinan masyarakat. Karena bagi masyarakat dengan aliran Islam *Muhammadiyah* yang sudah hidup moderat.

Selanjutnya yaitu tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*. Perkawinan bukanlah termasuk dalam ibadah *mahdhah*, melainkan ibadah dalam hal *muamalah*. Karena praktik penghitungan weton dalam adat Jawa termasuk dalam perkawinan, maka praktik tersebut tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*.

Terakhir adalah *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Penghitungan weton ini sudah sangat memasyarakat di Desa Karang, praktik ini sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh para leluhur dan masih terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya agar tetap ada dan tidak hilang hingga sekarang.

Berdasarkan syarat diterima atau tidaknya *'urf*, maka dapat di simpulkan bahwa, praktik penghitungan weton yang ada di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *'urf shahih*, karena praktik penghitungan weton telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai *'urf yang shahih*.

Dalam kaidah dasar *'urf* yang menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai patokan hukum, kaidah tersebut adalah:

أَلْعَادَةُ

مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>90</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat dapat dijadikan patokan hukum, namun harus tetap memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas.

Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka adat kebiasaan atau *'urf* dapat dijadikan sebagai hukum dalam masyarakat tersebut, namun jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai patokan hukum.

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-A'raf 199 menjelaskan bahwa diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf atau kebaikan. Dalam *'urf* ini bertujuan untuk kebaikan yaitu untuk kehati-hatian, tidak sepenuhnya

<sup>90</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 335.

meyakini hasil penghitungan weton ini. Bunyi QS.Al-A'raf sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

اعراف: ١٩٩ ﴿﴾

Artinya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf: 199)<sup>91</sup>

Adapun dari macam-macam 'urf segi ruang lingkup penggunaannya, praktik penghitungan weton ini termasuk kedalam 'urf khusus (*khash*), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.<sup>92</sup>

Karena penghitungan weton hanya berlaku di tanah Jawa, Juga dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada waktu akan melaksanakan perkawinan.

## **B. Analisis 'Urf Terhadap Penyelesaian Ketidakcocokan Penghitungan Weton di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.**

Penghitungan weton sebelum perkawinan memang tidak selalu menunjukkan hasil yang baik, ada juga hasil yang kurang baik. Untuk menyelesaikan ketidakcocokan dalam penghitungan weton, maka

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 7:199.

<sup>92</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih I*, 151.

perjanga memberikan saran atau alternatif yang dapat dilakukan untuk tetap bisa melaksanakan perkawinan.

Peneliti akan menganalisa penyelesaian yang diberikan oleh perjanga ketika mengalami ketidakcocokan saat penghitungan weton. Penyelesaian ketidakcocokan dalam penghitungan weton di antaranya:

1. Merayakan perkawinan di salah satu pihak.

Solusi dari perjanga yang pertama adalah pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan di salah satu pihak. Dapat pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan yang ditentukan melalui musyawarah para pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Penyelesaian ketidakcocokan dengan merayakan di salah satu pihak dalam pandangan *'urf* termasuk dalam *'urf shahih* karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi *'urf* yang *shahih* atau *'urf* yang dapat diterima telah terpenuhi.

Syarat yang pertama adalah harus *'urf* yang *shahih* yaitu *'urf* yang sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>93</sup>

Solusi merayakan di salah satu pihak tidak termasuk menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Asalkan semua syarat untuk melaksanakan perkawinan sudah terpenuhi maka sah lah perkawinan tersebut.

---

<sup>93</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 104.

Yang kedua adalah tidak menimbulkan *kemadharatan* dan tidak menghilangkan *kemashlahatan*. Solusi ini tidak akan menimbulkan *madharat* dan tidak menghilangkan *mashlahat* dalam kehidupan, asalkan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menentukan di pihak yang mana yang akan merayakannya.

Ketika dilakukan penghitungan weton tidak akan menimbulkan keburukan dan tidak menghilangkan kebaikan dalam perkawinan dan sudah ada musyawarah yang menghasilkan kesepakatan akan bagaimana pelaksanaan dari perkawinan itu nantinya.

Ketiga adalah telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Ketika terdapat ketidakcocokan dari hasil penghitungan weton, solusi ini sudah memasyarakat atau sudah umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan kaum muslim.

Selanjutnya, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*. Karena perkawinan tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah* melainkan ibadah dalam hal *muamalah*, maka solusi merayakan di salah satu pihak pun tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*.

Terakhir yaitu *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Karena solusi ini sudah dilakukan sejak dahulu maka dapat dikatakan bahwa solusi ini sudah memasyarakat dan juga dilakukan apabila terdapat ketidakcocokan hasil dari penghitungan weton seperti ini.



## 2. Mengubah hari pelaksanaan perkawinan

Setelah dihitung wetonnya dan menentukan hari baik, namun terdapat ketidakcocokan antar keluarga mempelai, Solusi dari perjangga adalah pelaksanaan perkawinan dirubah dengan memajukan atau memundurkan hari ijab qabulnya. Dicarikan hari yang lebih tepat untuk kedua pihak.

Penyelesaian ketidakcocokan dengan mengubah hari pelaksanaan perkawinan dalam pandangan *'urf* termasuk dalam *'urf shahih* karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi *'urf* yang *shahih* atau *'urf* yang dapat diterima telah terpenuhi.

Syarat yang pertama adalah harus *'urf* yang *shahih* yaitu *'urf* yang sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>94</sup>

Solusi mengubah hari pelaksanaan perkawinan tidak termasuk menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Asalkan semua syarat untuk melaksanakan perkawinan sudah terpenuhi maka sah lah perkawinan tersebut.

Yang kedua adalah tidak menimbulkan *kemadharatan* dan tidak menghilangkan *kemashlahatan*. Solusi ini tidak akan menimbulkan *madharat* dan tidak menghilangkan *mashlahat* dalam kehidupan, asalkan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menentukan hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan.

---

<sup>94</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 104.

Ketika dilakukan penghitungan weton tidak akan menimbulkan keburukan dan tidak menghilangkan kebaikan dalam perkawinan dan sudah ada musyawarah yang menghasilkan kesepakatan akan dilaksanakan kapan perkawinan itu nantinya.

Ketiga adalah telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Ketika terdapat ketidakcocokan dari hasil penghitungan weton, solusi ini sudah memasyarakat atau sudah umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan kaum muslim.

Selanjutnya, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*. Karena perkawinan tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah* melainkan ibadah dalam hal *muamalah*, maka solusi mengubah hari pelaksanaan perkawinan pun tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*.

Terakhir yaitu *'urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Karena solusi ini sudah dilakukan sejak dahulu maka dapat dikatakan bahwa solusi ini sudah memasyarakat dan juga dilakukan apabila terdapat ketidakcocokan hasil dari penghitungan weton seperti ini.

Pandangan *'urf* terkait penyelesaian ketidakcocokan ini adalah kalau perkawinan itu dimajukan maka termasuk dalam *'urf shahih*. Karena ketika perkawinan dimajukan maka secara otomatis hal ini tidak menimbulkan madharat yang lebih besar dalam masyarakat terutama keluarga.

Akan tetapi, jika pelaksanaan perkawinan tersebut dimundurkan, maka akan termasuk kedalam *'urf fasid*. Karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW terkait anjuran untuk menyegerakan perkawinan apabila sudah mampu, sedangkan adat ini harus mengundur pelaksanaan hanya karena alasan wetonnya kurang cocok.

Juga dapat menghilangkan *mashlahat* dan menimbulkan *madharat* bagi keluarga apabila calon pengantin tidak dapat menahan diri dan dapat menyebabkan keburukan yang tidak diharapkan, misalnya melakukan zina karena tidak sanggup menunggu waktu perkawinan yang dimundurkan.

Dari penyelesaian-penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa cara menyelesaikan masalah ketidakcocokan weton termasuk dalam *'urf shahih*, tetapi dalam solusi dari perjangga tidak semua termasuk dalam *'urf shahih* ada juga yang tergolong *'urf fasid*.

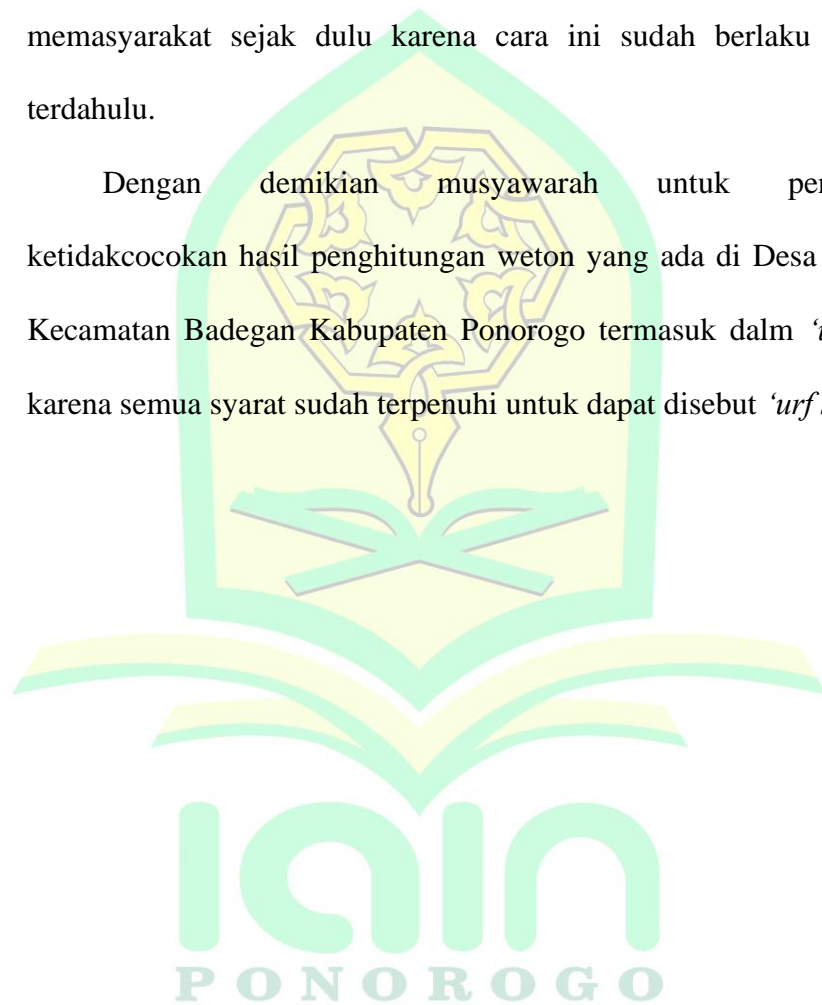
Penyelesaian apabila terdapat ketidakcocokan dari penghitungan weton biasanya kedua belah pihak bermusyawarah. Musyawarah yang dilakukan oleh kedua pihak tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, karena dengan musyawarah tersebut kedua belah pihak kemungkinan dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan membicarakan pendapat masing-masing tanpa emosi.

Hal ini tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan tidak menghilangkan *kemashlahatan* bagi kedua pihak tersebut, yaitu tidak membuat kedua pihak menjadi saling bermusuhan atau saling

membenci. Cara ini sudah berlaku umum dalam masyarakat jika terjadi ketidakcocokan seperti masalah penghitungan weton ini biasanya dilakukan musyawarah antar pihak.

Musyawarah ini digunakan untuk penghitungan weton sebelum perkawinan, jadi tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*. Serta sudah memasyarakat sejak dulu karena cara ini sudah berlaku dari para terdahulu.

Dengan demikian musyawarah untuk penyelesaian ketidakcocokan hasil penghitungan weton yang ada di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *'urf shahih* karena semua syarat sudah terpenuhi untuk dapat disebut *'urf shahih*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

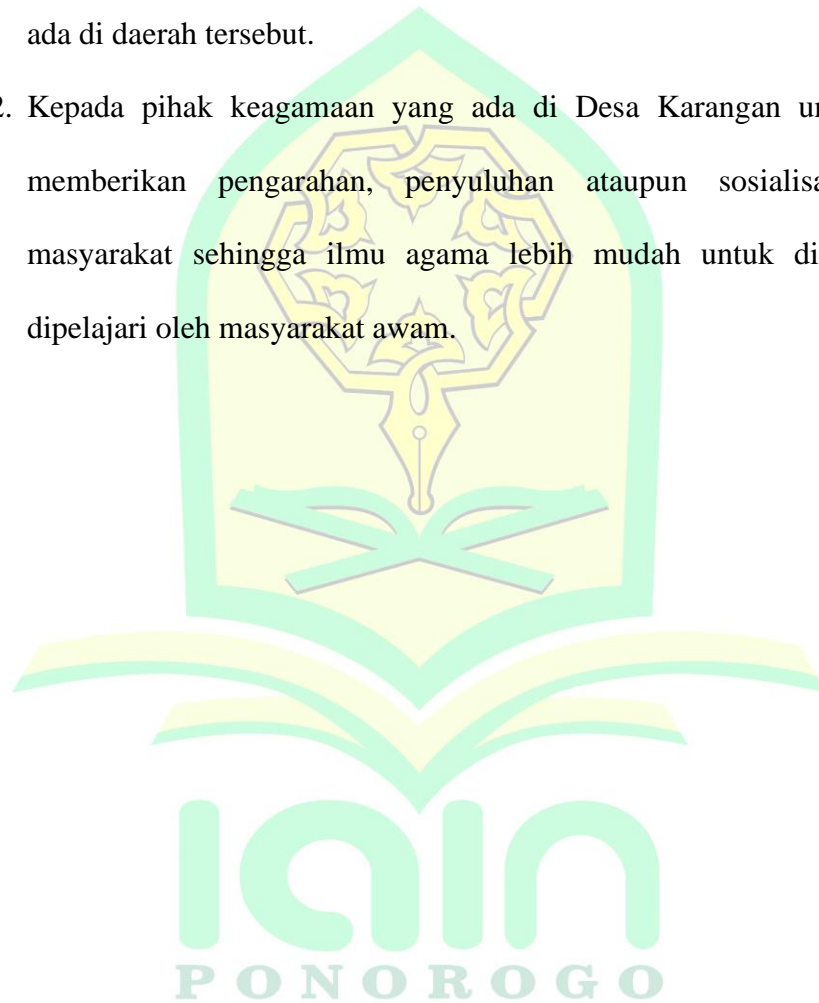
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik penghitungan weton di Desa Karang dilakukan oleh perjangga, di mana dalam pandangan '*urf*' termasuk dalam '*urf shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat dikatakan sebagai '*urf*' yang dapat diterima. Syarat-syaratnya adalah tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*, '*urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya
2. Penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton di Desa Karang dalam pandangan '*urf*' termasuk dalam '*urf shahih*', karena sudah sesuai dengan syarat '*urf*' dapat dikatan sebagai '*urf shahih*', yaitu tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menyebabkan *kemafsadahan* dan menghilangkan *kemaslahatan*, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*, '*urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. kepada masyarakat agar mempertahankan ilmu agama yang telah masyarakat miliki meskipun bersandingan atau hidup dengan adat yang ada di daerah tersebut.
2. Kepada pihak keagamaan yang ada di Desa Karang untuk lebih memberikan pengajaran, penyuluhan ataupun sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat awam.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: cv pustaka setia, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Bakry, Nazar. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu & Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Grafindo , 2012.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- al-Hasyimly, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Misno, Abdurrahman, Nurhadi. *Ilmu Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Nawani. *Ushul Fiqh*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid. Anita Marwing, Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi... Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode penelitin kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: sinar baru algensindo, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Sanusi, Ahmad, Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

- Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana prenada media group, 2009.
- Umam, Khairul dkk. *Ushul Fiqh-1*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqih 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

#### **Referensi Jurnal:**

- Safitri, Meliana Ayu, Adriana Mustafa. Tradisi Penghitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna*, 1, 2021.
- Faruq, Ahmad. Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan. *Irtifaq*, 1, 2019.

#### **Referensi Skripsi:**

- Rohmah, Miftah Nur. Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun). *Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2016.
- Mahmudah, Siti. Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi). *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.
- Nuha, Rista Aslin. Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam. skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

#### **Referensi Al-Qur'an:**

- Al-Qur'an. 51 : 49
- Al-Qur'an. 7 : 199
- Al-Qur'an. 4 : 21